

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 (Terpilihnya Haji Bambang Santoso sebagai DPD RI Dapil Bali)

Ni Made Ayuningsih¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : ayumade07@gmail.com¹⁾, erviantono2@yahoo.com²⁾, mahaswari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the issue of identity politics in the 2019 general election, specifically in the DPD RI legislative. Manuel Castells theory of identity politics is used to frame this study. The research method is a descriptive method with a qualitative approach. Respondents were selected by purposive technique. The result of this study is the existence of identity politics in the form of religious issues was employed in the election campaign for the DPD RI in the Bali Dapil by the candidate for the DPD RI Bali, namely Haji Bambang Santoso is the only Muslim DPD RI candidate in the Bali electoral district. With the tagline "together for the people and the nation," HBS positions itself as a Muslim representative in Bali who will always protect the Muslim community's interests and goals.

Keywords : Identity Politic, Haji Bambang Santoso, DPD RI

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2004, tujuan pembentukan DPD RI adalah untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut didasari indikasi nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI(dpd.go.id, 2014) bahwa sebagai lembaga

legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah pengajuan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Pemilu tahun 2019 ini merupakan periode keempat dilaksanakannya pemilihan DPD RI, dan untuk pertama kalinya dalam pemilu DPD RI daerah pemilihan Bali diikuti oleh kontestan yang berasal dari bukan Hindu. Terdapatnya calon DPD RI yang berasal dari bukan Hindu menimbulkan pro kontra di masyarakat menurut beberapa kalangan, calon DPD RI

haruslah seseorang yang asli dari daerah yang diwakilinya (bali.tribunnews, 2018). Hal ini disebabkan oleh beberapa dekade terakhir yang menjadi calon dalam pemilihan legislative DPD RI Dapil Bali merupakan figur yang sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat Bali atau dengan kata lain beragama Hindu.

Haji Bambang Santoso (HBS) mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI dapil Bali yang beragama Islam. Sebelum ditunjuk sebagai calon anggota DPD-RI mewakili umat Islam di Bali, HBS sudah aktif menjadi pengurus beberapa lembaga seperti menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Pimpinan Wilayah Provinsi Bali (2013-sekarang), Ketua Bidang Kemakmuran Masjid MUI Provinsi Bali (2015-2020), Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Bali dan Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur Monang-maning, Denpasar Bali.

Dalam penyerahan KTP ke kantor KPU Bali(bali.tribunnews, 2018), HBS didampingi langsung oleh Ketua MUI Bali, KH Muhammad Taufik Asy'adi menyerahkan sebanyak 2.736 KTP sebagai bentuk dukungan untuk maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil Bali.

Namun tidak hanya menjadi kontestan yang meramaikan pemilu, HBS mampu mendulang suara dan mengejutkan publik karena terpilih menjadi anggota DPD RI Provinsi Bali mengalahkan 18 kontestan lainnya (KPU:2019) yang beragama Hindu. HBS berhasil memperoleh 126.100 suara dan berada di peringkat ke empat setelah Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dengan perolehan 728.516 suara, Made Mangku Pastika dengan perolehan 264.845 suara,

Anak Agung Gde Agung perolehan 227.439 suara, dan diperingkat ke lima ditempati oleh Gede Ngurah Ambara Putra dengan perolehan 117.857 suara.

Perolehan suara HBS tertinggi berasal dari Kota Denpasar dengan jumlah perolehan 36.954 suara yang terbagi menjadi 4 kecamatan; Denpasar Barat 16.245 suara, Denpasar Selatan 9.657 suara, Denpasar Timur 3.892 suara, Denpasar Utara 7.160. Perolehan tertinggi kedua berasal dari Kabupaten Jembrana dengan 26.963 suara dan terbagi menjadi 5 kecamatan; Jembrana 4.360 suara, Melaya 4.784 suara, Mendoyo 2.161 suara, Negara 13.543 suara, Pekutatan 2.115 suara dan Kabupaten Buleleng menyumbang suara ketiga tertinggi yaitu 24.934 suara yang terbagi dalam 9 kecamatan; Banjar 942 suara, Buleleng 6.653 suara, Busung Biu 128 suara, Gerogak 9.695 suara, Kubutambahan 260 suara, Sawan 242 suara, Seririt 2.157 suara, Sukasada 4.288 suara dan Tejakula 567 suara (kpu: 2019).

Fenomena yang terjadi pada pemilu 2019 khususnya dalam persaingan memperebutkan kursi senayan ini menggambarkan ciri-ciri adanya Politik Identitas. Menurut Manuel Castells teori politik identitas sangat berkaitan erat dengan etnis dan identitas agama dari seseorang/kelompok dan berdasar pada seperangkat atribut kultural yang diprioritaskan diatas sumber-sumber pemaknaan lain. Dengan terpilihnya HBS, mencerminkan bahwa preferensi pemilihan Bali mulai memperhitungkan agama sebagai pertimbangan untuk memilih. Hal ini tidak terlepas dari Politik Identitas yang diterapkan dalam masyarakat sehingga penulis tertarik

untuk meneliti “Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum 2019 (Terpilihnya HBS sebagai DPD RI dapil Bali)”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Politik Identitas Manuel Castells

Teori yang relevan yang dipergunakan pada riset ataupun penelitian ini yakni teori politik identitas yang terkonstruksi berdasarkan beberapa konsep pemikiran yang relevan dari pemikiran tokoh-tokoh, seperti Manuel Castells, Anthony Giddens, dan Clifford Geertz. Konsep pemikiran tersebut saling berkaitan dan membangun teori politik identitas yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Konsep-konsep tersebut, yaitu: konsep pembentukan identitas dari Manuel Castells dan Anthony Giddens serta konsep etnisitas.

Politik identitas sangat berkaitan erat dengan identitas etnis dan identitas agama. Identitas menurut Castells (2010: 6) di dalam buku keduanya yang berjudul *The Power of Identity*, yaitu:

1. Identitas merupakan sumber makna dan pengalaman orang;
2. Identitas merupakan proses konstruksi makna yang berdasar pada atribut kultural, atau seperangkat atribut kultural, yang diprioritaskan diatas sumber-sumber pemaknaan lain;
3. Identitas bersifat jamak (*plural*) dan bukan tunggal (*singular*);
4. Identitas berfungsi untuk menata dan mengelola makna (*meanings*);
5. Identitas adalah sumber-sumber makna bagi dan oleh aktor yang

dikonstruksi dengan proses individuasi;

6. Identitas terkait dengan proses internalisasi nilai, norma.

Teori identitas Castells diatas, dikaitkan dengan identitas Haji Bambang Santoso sebagai tokoh muslim Bali merupakan proses konstruksi dari atribut kultural Islam dan atribut kultural etnis yang ada dalam masyarakat muslim. Identitas yang terbangun melalui proses konstruksi tersebut dimaknai sebagai identitas bersama yang melambangkan suatu daerah yang terdapat perkumpulan kesatuan identitas. Proses internalisasi nilai, norma, tujuan dan idealisme muslim Bali menguatkan identitas bersama (kolektif) dalam identitas kesamaan etnis kedaerahan dan identitas kesamaan agama Islam.

Menurut Giddens (1991: 75), identitas terbangun oleh kemampuan untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga terbangun suatu perasaan terus-menerus tentang kelangsungan atau kontinuitas biografi. Konsep identitas dari Giddens, penulis dapat interpretasikan bahwa identitas individu dapat terbentuk dari kemampuan mengidentifikasi diri dalam menghadapi kehidupan lingkungan dan sosial masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, muslim Bali mengidentifikasikan dirinya sebagai masyarakat minoritas yang tergabung dalam suatu komunitas kesamaan identitas agama, etnis dan wilayah tinggal. Kemunculan identitas sebagai minoritas, disebabkan oleh kuatnya dominasi masyarakat Hindu Bali.

Politik identitas muslim Bali bermula dari proses pembentukan pembangunan identitas masyarakat muslim. Hubungan politik dan kekuasaan dari identitas, dalam politik identitas, dikonstruksikan dalam pembentukan pembangunan identitas oleh seseorang atau sekelompok orang. Konstruksi sosial dari identitas selalu terjadi dalam konteks yang ditandai oleh hubungan kekuasaan. Castells (2010: 8) menyebutkan tiga model konstruksi identitas, yaitu:

- a. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*) yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor - aktor sosial.
- b. Identitas resisten (*resistance identity*) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotip oleh pihak-pihak lain, sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok dan golongannya. Sebuah terminologi yang disebutkan ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik identitas.
- c. Identitas proyek yaitu suatu identitas dimana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi

struktur masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kutipannya Castell (2010: 412), mengemukakan bahwa saat sebuah masyarakat mayoritas yang dominan, terdapat masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap ekonomi, budaya hingga pilihan politik, tergabung dalam identitas bersama. Politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Inti dari konsep identitas Castells, yaitu identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (Castells, 2010: 6-7) jika dalam proses pembentukannya dalam kondisi tertekan (identitas resisten) maupun pengaruh sebuah institusi/legitimasi (*legitimizing identity*), maka akan muncul identitas dalam istilah Calhoun disebut politik identitas (Castells, 2010: 8).

Menurut Buchari (2014: 20), politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik,

untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas, atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya. Buchari (2014: 24) menyimpulkan, politik identitas adalah aliran politik yang ingin melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti suku, agama, etnisitas, gender, jenis kelamin, dan orientasinya.

Menurut Geertz (1973: 250), ragam budaya dalam masyarakat majemuk seringkali memunculkan sikap-sikap primordialisme. Primordial sering digunakan sebagai politik identitas etnis, dimana identitas etnis tetap dipertahankan karena dianggap bermanfaat sebagai basis massa suatu kelompok yang dapat digerakkan. Menurut Geertz, 6 elemen pembentuk ikatan primordial, yaitu: ikatan kekerabatan, ras, bahasa, wilayah, agama dan adat istiadat. Agama sebagai sumber ikatan primordial mempunyai nilai efektif dalam mempersatukan penganutnya.

Politik identitas dalam format keetnisan, tercermin dari upaya memasukkan nilai etnis kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus, sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu

(Latif, 2009: 136). Fenomena politik identitas dari muslim kampung Jawa di Denpasar yang dikaitkan dengan format keetnisan dan keagamaan, berujung kepada partai politik sebagai wadah untuk mencapai kekuasaan politik dalam memasukan nilai-nilai keagamaan hingga identitas keetnisan sebagai penguatan krtokohan dengan berbasis identitas keagamaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ataupun riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempergunakan data sekunder serta juga primer guna mengetahuinya politik identitas yang terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam pemenangan Haji Bambang Santoso sebagai DPD Ri Dapil Bali.

Penentuan informan dilakukan melalui metode purposive sampling. Responden dipilih sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari staf khusus dari HBS, ketua tim pemenangan kota Denpasar dan timses di wilayah Pemecutan Kelod yang paham dan menguasai mengenai topik penelitian yang diangkat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sementara itu data sekunder didapatkannya dari jurnal, buku, serta riset yang sebelum-sebelumnya. Peneliti juga mempergunakannya teknik analisa data yang mencakup penyajian data, reduksi data, serta juga pengambilan sebuah kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Identitas Haji Bambang Santoso

Haji Bambang sudah membangun identitasnya sendiri, dengan latar belakang pengalaman di organisasi membentuk

identitas HBS sebagai tokoh muslim dikalangan masyarakat. Sebelum terjun di dunia politik HBS sudah cukup dikenal oleh beberapa masyarakat terutama kalangan pengusaha dan kalangan pedagang. HBS merupakan pengusaha kain endek yang sudah memiliki beberapa cabang toko di Bali, selain sebagai pengusaha HBS juga aktif sebagai salah satu pengurus organisasi besar agama Islam seperti MUI wilayah Bali, DMI wilayah Bali dan juga sebagai Pembina di beberapa masjid yang ada di wilayah Denpasar.

Selama bergabung dalam organisasi HBS tidak hanya sekedar menjadi anggota pasif, HBS adalah satu pengurus yang sangat aktif sehingga dengan pengalamannya sebagai pengurus organisasi besar Muslim HBS sudah cukup mengenal tokoh-tokoh masyarakat muslim maupun tokoh masyarakat yang duduk di kursi pemerintahan. Peran aktif HBS dalam organisasi MUI menghasilkan kepercayaan dari seluruh pengurus MUI Bali dan tokoh umat muslim lainnya sehingga pada MUSDA MUI tahun 2018 HBS ditunjuk dan didorong untuk menjadi perwakilan umat muslim dalam pemilihan umum sebagai calon DPD RI dapil Bali.

Haji Bambang Santoso membranding dirinya sebagai tokoh umat yang mewakili suara umat muslim yang ada di Bali dengan menggunakan kultur dan budaya umat muslim seperti menggunakan peci saat melakukan aktivitasnya di masyarakat. Seperti yang masyarakat umum ketahui peci selalu identik dengan umat muslim misalnya peci hitam untuk kegiatan resmi dan peci putih sering digunakan untuk menunaikan ibadah salat.

Selain dengan penegasannya menggunakan pakaian yang khas, HBS juga memanfaatkan kultur dan kebiasaan umat muslim agar lebih diperhatikan, potensi dirinya yang merupakan seorang Dai/pendakwah juga menjadi kelebihan dari HBS.

Dengan menjadi seorang dai/pendakwah HBS sosok yang dihormati oleh masyarakat karena dianggap lebih memahami ajaran agama dibandingkan orang yang tidak memiliki latar belakang dai. Dai bisa disebut juga dengan pendakwah, sangat disegani oleh masyarakat bahkan sampai memiliki pengikut. Dengan potensinya HBS lebih mudah untuk mendapat simpati masyarakat dan mendapat dukungan masyarakat. Sehingga pada saat HBS mengikuti pemilihan DPD RI dapil Bali pada pemilu 2019 yang lalu, tim pemenangan HBS setiap daerah di Bali saling berkoordinasi untuk membuat jadwal kunjungan HBS ke majelis takmil yang ada di setiap-setiap daerah di Bali. Kedangan HBS ke majelis takmil tidak hanya untuk menjadi pendakwah saja, disetiap sesinya selalu di selipkan dengan kampanye dan meminta dukungan masyarakat agar mendukungnya menjadi DPD RI dapil Bali.

Sebagai tokoh muslim Bali HBS mampu menggambarkan dirinya sebagai tokoh muslim yang toleran. Banyak julukan yang disematkan oleh masyarakat kepada HBS, diantaranya disebut sebagai tokoh penyambung lidah dan tokoh penyejuk susasana. HBS pada tahun 2012 saat bentrokan antar warga Balinuraga (warga Bali asli) dan warga desa Agong, Lampung Selatan, ia turun langsung sebagai perwakilan

Bali yang ikut melakukan negoisasi perdamaian.

Pemilihan Umum 2019 bukan pertama kalinya umat muslim mengirimkan calonnya untuk mengikuti pemilihan legislatif, pada tahun 2004 perwakilan dari umat muslim yang diwakili oleh Bapak Akhad Sastra, Sahru Ardi Abas, Amak Baras mengikuti pemilihan legilatif DPD RI dapil Bali. Namun megalami kegagalan karena suara umat muslim Bali saat itu terpecah, karena terdapat tiga calon sekaligus. Tidak menyerah dengan pemilihan sebelumnya, periode selanjutnya pada pemilihan tahun 2009 Bapak H.Maman Supratman ditunjuk sebagai calon legislatif dari umat muslim dan dicalonkan sebagai DPD RI dapil Bali namun gagal karena kurangnya perolehan suara.

Pemilu selanjutnya tahun 2014 kembali umat muslim mengirim perwakilannya dalam pemilihan legislatif dan yang dicalonkan adalah Bapak H.Masrur Makmur namun sama seperti pemilihan dua periode sebelumnya, H.Masrur Makmur gagal menjadi anggota parlemen. Dan di tahun 2019 perwakilann umat muslim kembali unjuk dan mengikuti pemilihan legislatif DPD RI dengan menunjuk Haji Bambang santoso yang kemudia berhasil lolos empat besar sebagai anggota DPD RI dapil Bali untuk periode 2019-2024 dan menjadi sejarah bagi umat muslim di Bali.

Kemenangan Haji Bambang Santoso sebagai DPD RI Dapil Bali tidak terlepas dari pengalamannya sebagai pengurus organisasi muslim seperti MUI Bali dan DMI Bali. Selain itu sebagai seorang dai/pendakwah tentu menjadi keuntungan besar yang didapat oleh HBS seorang dai dianggap juga sebagai guru

yang mengajak masyarakat untuk menerapkan ajaran agama Islam dengan begitu HBS menjadi panutan bagi umat muslim. Selain karena latarbelakang pendakwah, HBS dipandangan oleh masyarakat sebagai tokoh yang mampu merangkul semua umat tanpa memandang partai ataupun aliran agama yang yang di percayai oleh masyarakat.

Isu Politik Identitas dalam Kampanye Haji Bambang Santoso

Haji Bambang Santoso memulai karir politiknya untuk pertama kali melalui pemilihan DPD RI Dapil Bali tahun 2019. Haji Bambang Santoso direkomendasikan untuk tampil sebagai calon DPD RI dapil Provinsi Bali ketika musyawarah daerah (musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali tahun 2018 oleh pegurus dan anggota MUI dan tokoh umat musli Bali yang tergabung sebagai peserta musda kala itu. Merupakan tokoh muslim satu-satunya di pemilihan DPD RI tahun 2019 untuk dapil Provinsi Bali. Dengan *track record* Haji Bambang Santoso di masyarakat memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dengan citra yang baik, meski HBS belum memiliki pengalaman di bidang politik.

Maka dari itu, penguatan dalam hal ketokohan dilakukan dengan membentuk kesan bahwa Haji Bambang Santoso adalah tokoh Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Bali. Terlebih mayoritas penduduk di Bali adalah beragama Hindu sehingga aspirasi akan lebih mudah tersampaikan jika memiliki wakil dengan identitas yang sama di

parlemen. Penggunaan tagline “Bersatu Untuk Umat dan Bangsa” akhirnya dipilih untuk mewakili visi, misi HBS dengan sasaran utamanya masyarakat muslim di Bali. Keberhasilan Haji Bambang Santoso sebagai anggota DPD RI tidak terlepas dari strategi kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangannya.

Dengan sokongan penuh dari pengurus DMI Bali dan MUI Bali Haji Bambang Santoso merekrut orang-orang kepercayaan dari dua organisasi besar tersebut untuk membantunya dalam perhelatan politik yang diikutinya. Strategi kampanye yang digunakan oleh tim pemenangan HBS dengan menunjukkan dan memperkenalkan pada masyarakat bagaimana figur dari HBS sendiri selaku perwakilan umat muslim. Dengan menyasar kegiatan-kegiatan masyarakat muslim seperti majelis taklim atau pengajian-pengajian dan hari perayaan keagamaan.

Target lokasi kampanye yang menyasar adanya perkumpulan umat muslim seperti masjid, musolah dan yayasan-yayasan khusus muslim seperti pesantren. Selain kegiatan pengajian, kampanye dilakukan dengan memanfaatkan waktu setelah ibadah shalat jumat. Masjid sering menjadi lokasi kampanye HBS, contohnya masjid yang terletak di daerah Perumahan Monang-Maning ini menjadi salah satu lokasi kampanye HBS saat pemilu 2019 lalu karena masjid ini terkenal sebagai masjid yang makmur sesuai namanya dan merupakan masjid dengan keramaian jamaahnya

terutama saat Salat Subuh. Selain itu, Monang-maning juga merupakan daerah yang menjadi perhatian khusus tim HBS karena berada dilingkungan tempat tinggal HBS sendiri dan secara tidak langsung masyarakat Monang-maning sudah akrab dengan sosok HBS.

Wilayah Denpasar memang menjadi targer utama dalam melaksanakan kampanye, karena mayoritas masyarakat muslim yang ada di Bali tinggal di Kota Denpasar. Ketua tim pemenangan wilayah Denpasar dr.Taha menuturkan bahwa Denpasar merupakan wilayah yang menjadi target khusus kampanye HBS terutamanya kecamatan Denpasar Barat seperti Desa Pemecutan Kelod, Pemecutan dan Padangsambian. Masjid sering menjadi lokasi kampanye HBS, contohnya masjid yang terletak di daerah Perumahan Monang-Maning menjadi salah satu lokasi kampanye HBS saat pemilu 2019 lalu karena masjid ini terkenal sebagai masjid yang makmur sesuai namanya dan merupakan masjid dengan keramaian jamaahnya terutama saat Salat Subuh.

Bambang Santoso harus berbangga hati terhadap kemenangannya di Kota Denpasar yang merupakan perolehan suara terbanyak ke-2 setelah Arya Wedakarna yang berhasil mendapatkan 118.021 suara. Dengan jumlah suara final HBS berhasil memperoleh 126.100 suara dan berada di posisi ke empat setelah Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dengan perolehan 728.516 suara di posisi pertama, Made Mangku Pastika dengan perolehan 264.845 suara posisi kedua, Anak

Agung Gde Agung perolehan 227.439 suara di posisi ketiga. Dengan demikian HBS menjadi anggota DPD RI Dapil Bali periode 2019-2024.

Analisa Hasil Temuan

Teori politik identitas menurut Manuel Castells sangat berkaitan erat dengan identitas etnis dan identitas agama. Dalam buku Castells yang berjudul *The Power of Identity*, identitas dibagi menjadi beberapa faktor pembangun identitas yaitu; identitas merupakan sumber makna dan pengalaman orang, identitas merupakan proses konstruksi makna yang berdasar pada atribut cultural atau seperangkat atribut kultural yang diprioritaskan diatas sumber-sumber pemaknaan lain, identitas bersifat jamak (*plural*) dan bukan tunggal (*singular*), identitas berfungsi untuk menata dan mengelola makna (*meanings*), identitas adalah sumber-sumber makna bagi dan oleh aktor yang dikonstruksi dengan proses individuasi dan identitas terkait dengan proses internalisasi nilai, norma dan tujuan. Berdasarkan teori Manuel Castells identitas yang dibentuk oleh HBS untuk mendapat identitasnya sebagai seorang tokoh umat muslim di Bali.

Identitas merupakan sumber makna dan pengalaman orang, identitas bersumber dari pengalaman seseorang jika dikaitkan dengan sosok Haji Bambang

Santoso identitas yang kuat sudah dibentuk oleh HBS sendiri. Dengan latar belakang pengalaman organisasi dan non-organisasi yang sudah dimiliki HBS sudah membentuk identitas tersendiri. Sebelum terjun di dunia politik HBS sudah cukup dikenal oleh beberapa masyarakat terutama kalangan pengusaha dan kalangan pedagang. HBS merupakan pengusaha kain endek yang cukup terkenal di Denpasar, Bali. Dalam organisasi HBS tidak hanya sekedar menjadi anggota pasif, HBS adalah satu pengurus yang sangat aktif sehingga dengan latar belakang sebagai pengurus organisasi besar Muslim HBS sudah cukup mengenal tokoh-tokoh masyarakat muslim Bali maupun tokoh masyarakat Hindu umumnya.

Peran aktif HBS dalam organisasi MUI menghasilkan kepercayaan dari seluruh pengurus MUI Bali dan tokoh umat muslim lainnya sehingga pada MUSDA MUI tahun 2018 HBS ditunjuk dan didorong untuk menjadi perwakilan umat muslim dalam pemilihan umum sebagai calon DPD RI dapil Bali.

Identitas merupakan proses konstruksi makna yang berdasar pada atribut kultural yang diprioritaskan. Kaitannya dengan identitas yang dibangun oleh HBS yaitu, HBS membranding dirinya dengan tokoh umat yang mewakili suara muslim yang ada di Bali dengan menggunakan kultur/ budaya umat muslim seperti menggunakan peci saat melakukan aktivitasnya di masyarakat. Seperti yang masyarakat ketahui peci selalu identik

dengan umat muslim misalnya peci hitam untuk kegiatan resmi dan peci putih sering digunakan untuk menunaikan ibadah salat. HBS juga memanfaatkan potensi dirinya yang merupakan seorang Dai/pendakwah untuk lebih dikenal oleh masyarakat.

Identitas bersifat jamak (plural) dan bukan tunggal (singular), identitas tidak selalu bersifat tunggal seperti yang ditampilkan oleh HBS sebagai tokoh muslim Bali HBS mampu menggambarkan dirinya sebagai tokoh muslim yang toleran. Banyak julukan yang disematkan oleh masyarakat kepada HBS, diantaranya disebut sebagai tokoh penyambung lidah dan tokoh penyejuk suasana. HBS pada tahun 2012 saat bentrokan antar warga Balinuraga (warga Bali asli) dan warga desa Agong, Lampung Selatan, ia turun langsung sebagai perwakilan Bali yang ikut melakukan negosiasi perdamaian.

Identitas berfungsi untuk menata dan mengelola makna (*meanings*), ditengah keadaan masyarakat Bali yang multikultur HBS mampu membangun *image* sebagai tokoh masyarakat yang memiliki toleransi. Selain sebagai penyambung lidah, HBS juga mendapat julukan "penyejuk suasana" karena pernah ikut menentramkan emosi warga Bali sekaligus penyejuk saat insiden Nyepi di Bali ketika terjadi baku hantam antara seorang muslim dan pecalang setempat 2017 silam. Tampak seperti insiden kecil, namun berita tersebut sudah tersebar dan memicu emosi umat Islam. Dengan pengalaman-pengalamannya HBS mampu

menarik perhatian masyarakat muslim Bali maupun masyarakat non muslim yang tergambar pada pemilihan umum tahun 2019 yang lalu, dimana beberapa masyarakat bahkan sudah mengetahui sosok HBS sebelum dicalonkan sebagai DPD RI dapil Bali. Masyarakat non muslim umumnya mengenal sosok HBS sebagai pengusaha endek.

Identitas adalah sumber-sumber makna bagi aktor yang dikonstruksi (dibangun) dengan proses individuasi (proses perubahan menjadi lain dr yang lain). Sebagai tokoh masyarakat muslim Bali yang memperjuangkan kursi parlemen, sosok HBS sudah tidak diragukan lagi terbentuk dari pengalamannya sebagai pengurus MUI Bali dan ketua DMI Bali sudah mampu menarik simpati dan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat muslim.

Bukan hanya sebagai pengurus yang hanya duduk didepan saat rapat HBS selalu berusaha untuk tampil dan lebih dekat dengan masyarakat, dengan menjadi seorang dai/pendakwah adalah posisi yang paling dekat dengan masyarakat. Dai bisa disebut juga dengan pendakwah, sangat disegani oleh masyarakat bahkan sampai memiliki pengikut. HBS juga sebagai seorang dai/pendakwah juga memiliki orang-orang yang menjadi pengikutnya. Sehingga dalam pemilihan umum 2019 dengan *trek record* dari pengalamannya di masa lalu membentuk dan membantu HBS menjadi anggota parlemen sekarang.

Identitas terkait dengan proses internalisasi (pendalaman/penghayatan) nilai,

norma dan tujuan. Sebagai seorang tokoh masyarakat tentunya harus memiliki nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Haji Bambang Santoso (HBS) juga tidak lepas dari proses internalisasi nilai yang ada dimasyarakat. Sebagai anggota parlemen yang beragama muslim di lingkungan masyarakat Bali yang mayoritas Hindu ini, HBS mampu menanamkan nilai toleransi dan menjadi tokoh intergrasi bagi masyarakat Bali yang multikultur ini. HBS menjadi perwakilan umat muslim dalam perhelatan politik 2019 lalu, walaupun target utama dalam penarikan suara adalah masyarakat muslim Bali namun HBS tetap menjadi sosok toleran yang bisa dilihat dari pengalamannya sebelum masa pemilu.

Teori identitas Castells diatas, dikaitkan dengan identitas Haji Bambang Santoso sebagai tokoh muslim Bali merupakan proses kontruksi dari atribut kultural Islam dan atribut kultural etnis yang ada dalam masyarakat muslim. Identitas yang terbangun melalui proses kontruksi tersebut dimaknai sebagai identitas bersama yang melambangkan suatu daerah yang terdapat perkumpulan kesatuan identitas. Proses internalisasi nilai, norma, tujuan dan idealisme muslim Bali menguatkan identitas bersama (kolektif) dalam identitas kesamaan etnis kedaerahan dan identitas kesamaan agama. Identitas etnis kedaerahan disini adalah daerah Bali dan identitas keagamaan adalah agama Islam. Identitas keagamaan yang sudah terkontruksi melahirkan politik identitas.

Politik identitas muslim Bali dari proses pembentukan pembangunan

identitas masyarakat muslim. Hubungan politik dan kekuasaan dari identitas, dalam politik identitas, dikonstruksikan dalam pembentukan pembangunan identitas oleh seseorang atau sekelompok orang. Konstruksi sosial dari identitas selalu terjadi dalam konteks yang ditandai oleh hubungan kekuasaan. Castells (2010: 8) menyebutkan tiga bentuk pembangunan identitas, pertama identitas legitimasi (*legitimizing identity*) yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial. Kedua identitas resisten (*resistance identity*) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotip oleh pihak-pihak lain, sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok dan golongannya. Sebuah terminologi yang disebutkan ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik identitas

Berdasarkan teori pembentukan pembangunan identitas Castells diatas, identitas yang dimainkan oleh Haji Bambang Santoso merupakan pembentukan identitas berdasarkan identitas legitimasi (*legitimizing identity*) dan identitas proyek. Identitas HBS yang terbentuk dari latar belakang HBS sebagai bagian dari pengurus MUI Bali maupun sebagai ketua DMI Bali dimana keduanya merupakan organisasi muslim yang sangat dipercaya oleh umat muslim.

Selain berdasarkan latar belakang sebagai pengurus organisasi muslim HBS juga memiliki kepercayaan dan dukungan penuh dari tokoh-tokoh muslim yang cukup disegani oleh masyarakat muslim di Bali sehingga bisa dikatakan identitas figur HBS sendiri terbangun dari identitas legitimasi dan identitas proyek. Sedangkan masyarakat muslim Bali merupakan pembentukan identitas resisten (*resistance identity*). Pembentukan identitas resisten muslim Bali, merupakan akibat dari identifikasi dirinya sebagai masyarakat minoritas di Bali dan minoritas disini dalam kaitannya dengan dominasi.

Dalam kutipannya Castell (2010: 412), mengemukakan bahwa saat sebuah masyarakat mayoritas yang dominan, terdapat masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap ekonomi, budaya hingga pilihan politik, tergabung dalam identitas bersama. Politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Inti dari konsep identitas Castells, yaitu identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (Castells, 2010: 6-7). Jika dalam proses pembentukannya dalam kondisi tertekan (identitas resisten) maupun pengaruh sebuah institusi/legitimasi (*legitimizing identity*), maka akan muncul identitas dalam istilah Calhoun disebut politik identitas (Castells, 2010: 8).

Teori identitas Castells diatas, dikaitkan dengan identitas yang dibentuk oleh HBS yang merupakan proses konstruksi dari atribut kultural Islam dan atribut kultural etnis yang ada dalam masyarakat muslim. Identitas yang terbangun melalui proses konstruksi tersebut dimaknai sebagai identitas bersama yang melambangkan suatu daerah yang terdapat perkumpulan kesatuan identitas. Proses internalisasi nilai, norma, tujuan dan idealisme muslim Bali menguatkan identitas bersama (kolektif) dalam identitas kesamaan etnis kedaerahan dan identitas kesamaan agama. Kesamaan identitas etnis kedaerahan disini digambarkan sebagai masyarakat muslim yang bersama-sama tinggal di Bali dan kesamaan identitas agama disini adalah masyarakat Bali yang beragama Islam.

Kegiatan yang dilakukan warga negara atau biasa disebut sebagai masyarakat biasa (sipil) dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah disebut sebagai partisipasi politik menurut pendapat dari Huntington dan Nelson. Salah satu bentuk partisipasi politik yaitu pemilihan umum. Partisipasi dalam pemilihan umum mungkin merupakan bentuk partisipasi politik yang paling populer. Kegiatan yang dilakukan HBS dalam pencalonannya sebagai DPD RI merupakan salah satu bentuk dari penerapan partisipasi politik. Dimana HBS sendiri menjadi kandidat dalam pemilihan umum dan melakukan kampanye sebagai usaha menarik dukungan dari masyarakat dengan tujuan mendapatkan hasil pemilihan yang diinginkan yaitu

memenangkan pemilihan legislatif DPD RI Dapil Bali.

Konsep Etnisitas menurut Frederich Barth menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Keterkaitan konsep etnisitas dengan apa yang dilakukan HBS dalam pemilu 2019, HBS memanfaatkan adanya kesamaan agama yang dimilikinya untuk menarik simpati masyarakat muslim untuk bersama mendukungnya sebagai perwakilan umat muslim. Dengan memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan dan memiliki sejarah yang sama sehingga mereka memiliki keterikatan sosial sehingga mampu menciptakan sebuah sistem budaya dan mereka terikat didalamnya. Keterikatan agama yang dimiliki masyarakat muslim Bali dan kesamaan tinggal di daerah yang bukan mayoritas muslim membuat masyarakat muslim Bali dan HBS mempunyai tujuan dan harapan yang sama untuk diperjuangkan. Identitasnya sebagai tokoh muslim Balipun menghantarkan HBS sebagai anggota parlemen saat ini.

1. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan identitas yang dimiliki Haji Bambang Santoso sebagai tokoh muslim sudah dibentuk oleh dirinya sebelum melenggang ke ranah politik. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Imanuel Catells, identitas dapat terbentuk dari pengalaman seseorang dan konstruksi

kultur. Haji Bambang Santoso dengan pengalaman-pengalaman organisasi yang diikutinya menciptakan identitasnya dan menjadi tokoh muslim yang disegani oleh masyarakat muslim Bali. Pengalamannya sebagai pengurus MUI Bali dan DMI Bali menjadi satu langkah besar untuk Haji Bambang Santoso yang kemudian diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan umat muslim dalam pemilihan DPD RI Dapil Bali.

Haji Bambang Santoso sebagai satu-satunya calon DPD RI dapil Bali yang beragama muslim menjadi satu keuntungan untuknya. Memanfaatkan kesamaan agama yang dimiliki, Haji Bambang Santoso menarik simpatisan dari masyarakat muslim Bali untuk menjadi pendukungnya. Dengan identitasnya sebagai tokoh muslim Bali yang disegani, Haji Bambang Santoso berhasil meraih kemenangannya sebagai anggota DPD RI Dapil Bali periode 2019-2024.

2. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afala. L. M. (2018). *Politik Identitas Di Indonesia*. Malang: UB Press
- Azwar, Saifuddin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholisin, dkk . (2007). *Pengantar Ilmu Politik* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lorens, B. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Telly Sumbu, dkk. (2010). *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jakarta: Permata

Ubed, Abdullah. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*.

Skripsi

Dewi, Sintya. (2021). *Aktor Penghubung dalam Modular Parties*. Universitas Udayana.

Prima, Andy. (2018). *Politik identitas dalam pemilihan kepala daerah (studi kasus pada pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Zharfandy, Irfan. (2016). *Pengaruh politik identitas terhadap pemilihan gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

Barth, Frederik. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

Buchari, Astuti, Sri. (2014). *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

Castells, M. (2003). *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*. Vol II. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA

Dody. Andriyan. (2018). "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bikameralisme", *Volksgeist*, Vol. 1. Diakses pada 14 Januari 2022. Pukul 16.00 WITA

Geertz, Clifford. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

Haboddin, Muhtar. (2012). *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*. Diakses dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/a>

[rticle/view/152](http://article/view/152). Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA

Purwanto. (2015). *Politik Identitas dan resousi Konflik Transformatif*. *Jurnal review Politik* 5 nomer 1 hal: 60-83. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA

Sofianto, Arif. (2016). *Peran Agama Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Tengah*. Diakses dari <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/analisa>. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

Sulardi. (2016). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Legislatif Berdasarkan UUD Negara RI 1945*. Jakarta. *Jurnal Konstitusi* Vol. IV. Diakses pada 14 Januari 2022. Pukul 16.00 WITA.

Website

bali.tribunnews.com. (2018). *Haji Bambang Santoso siap rebut kursi DPD*. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com/haji/bambang/siap/rebut/kursi/dpd>. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

bali.bps.go.id. (2011). *Hasil Sensus Penduduk Bali*. Diakses dari <https://bali.bps.go.id/penduduk/provinsi/bali/menurut/agama/yang/dianut/hasil/sensus/penduduk/2010>. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

dpd.go.id. (2014). *Profil Dewan Perwakilan Daerah*. Diakses dari <https://latar.belakang/tugas/fungsi/wenang/dpd>. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

kpu.go.id. (2019). *Hasil Hitung Suara DPD*. Diakses dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/rekapitulasi/hasil/suara/dpd/bali>. Diakses pada 25 September 2019. Pukul 16.00 WITA.

